

Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Sudrajat Martadinata

Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

prof.sudrajat@gmail.com

Abstrak:

Akuntansi sektor publik memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, terutama dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Penelitian ini bertujuan memahami perkembangan dan kondisi akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini. Untuk mencapai tujuan penelitian, jenis penelitian kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang fenomena yang kompleks dan kontekstual, yang sering kali tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dalam melakukan analisis studi literature menggunakan alat bantu typeset.io. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia sangat dinamis. Di tengah kondisi itu akuntansi sektor publik masih diterapkan dan dibutuhkan untuk mengukur kinerja organisasi.

Kata Kunci: Akuntansi, sektor publik, kinerja organisasi, studi literatur

Abstract:

This research aims to understand the current development and condition of public sector accounting in Indonesia. In order to achieve the research objectives, qualitative analysis was carried out using a literature study approach. In conducting literature study analysis using the typeset.io tool. The research conclusion states that public sector accounting in Indonesia is very dynamic. In the midst of these conditions, public sector accounting is still applied and needed to measure organizational performance.

Keywords: *Accounting, public sector, organizational performance, literature study*

Pendahuluan

Akuntansi sektor publik memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, terutama dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Keberhasilan dalam suatu pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya (Karlina et al., 2023). Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai kegiatan jasa yang terdiri dari pencatatan, pengkategorian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya

akan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu, dan sesuai untuk pengelolaan dana publik pada lembaga tingkat tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya (Sujarweni, 2015).

Di Indonesia, penerapan akuntansi sektor publik telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian seiring dengan dinamika perkembangan kebijakan pemerintahan dan tuntutan masyarakat akan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Arus informasi dan teknologi turut serta membawa perubahan dan perkembangan bagi akuntansi sektor publik. Dampak yang diharapkan dari kemajuan teknologi terhadap akuntansi sektor publik adalah berupa semakin mudah dan cepatnya pelaksanaan berbagai proses akuntansi, serta semakin akuratnya informasi yang dihasilkan dari proses tersebut (Kristiani & Hamidah, 2022). Periode komputerisasi menyajikan pandangan dunia lain dalam bidang pembukuan, bahwa kemajuan mekanis dengan setiap item mereka dipandang cocok untuk mencocokkan pekerjaan penting pembukuan dalam menyelesaikan berbagai latihan pembukuan yang penting bagi organisasi (Khaffifah et al., 2020).

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sering menjadi sorotan. Banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan korupsi yang terungkap, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal.

Pengelolaan aset dan liabilitas pemerintah sering kali kurang efektif dan efisien. Inventarisasi aset tidak dilakukan secara teratur, dan nilai aset seringkali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat dalam laporan keuangan.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi akuntansi sektor publik juga diperkuat dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Penerapan SAP bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menawarkan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk pemerintahan, baik pusat maupun daerah. SAP juga akan memastikan bahwa pemerintahan yang baik dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajiban (Yogi Pranata, 2024).

Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi publik, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan di beberapa tingkat pemerintahan. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan dicarikan solusinya agar tujuan dari penerapan akuntansi sektor publik dapat tercapai secara optimal. Tantangan lain juga muncul, misal adanya penelitian yang melihat akuntansi dari sudut pandang budaya. Secara kritis diebutkan akuntansi Indonesia mengadopsi akuntansi barat yang sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa (Briando, 2021). Di kajian lain juga menyampaikan bahwa

akuntansi secara paraktik hanya berhenti pada tujuan nominal rupiah semata (Martadinata, 2023).

Ada pun penelitian yang serupa dilakukan oleh (Rizky & Setiawan, 2019), dalam penelitiannya yang berjudul "Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode "charting the field". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa topik yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik adalah topik mengenai akuntansi keuangan dan untuk model yang sering digunakan adalah metode kuantitatif dan juga metode survei serta archival.

Metode

Untuk mencapai tujuan penelitian, jenis penelitian kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang fenomena yang kompleks dan kontekstual, yang sering kali tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan studi literatur ini dikerjakan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan perkembangan isu yang sedang diajukan di dalam penelitian (Handayani et al., 2024). Studi literature menjadi pendekatan untuk membedah masalah penelitian ini. Secara teknis studi literature ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel ilmiah yang sesuai dengan topic teliti ini. Setelahnya dianalisis masing-masing artikel mengetengahkan hal apa saja yang spesifik berkaitan dengan akuntansi sektor publik di Indonesia (Martadinata, 2024). Di dalam konteks penelitian ini studi literature dilakukan menggunakan alat bantu typeset.io. Alat ini dapat membantu di dalam pemetaan artikel guna penyusunan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ditemukan beberapa hal penting berikut ini. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga prinsip transparan dan akuntabel dapat menjadi kenyataan yang kuat. Pemerintah Indonesia mengadopsi SAP berbasis akrual untuk transparansi dan akuntabilitas. Adopsi akuntansi akrual di pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Informasi akuntansi akrual memiliki peran marginal dalam keputusan manajer publik.(Fahlevi et al., 2022). Perdebatan mengenai perlunya dan pentingnya akuntansi akrual sangat aktif terjadi. Meski demikian akuntansi akrual mulai untuk sektor publik diterapkan di Indonesia sejak tahun 2015 (Maqdliyan, 2022).

Tuntutan pemangku kepentingan mendorong reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Atas hal tersebut disusun dan diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010 yang mengubah praktik akuntansi Indonesia (Kahar et al., 2023). Reformasi yang bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik melalui manajemen keuangan (Fandi Prasetya, 2023). Penegakan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat perlu diupayakan lebih intensif oleh pemerintah daerah untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja (Hasthoro & Sunardi, 2016). Akuntansi sektor publik sangat penting untuk

diterapkan. Ternyata memberikan kinerja organisasi yang positif. Salah satunya jika diterapkan pada organisasi perawatan kesehatan (Elim et al., 2022).

Kesimpulan

Merujuk ke pembahasan di atas. Akuntansi sektor publik lahir dan berkembang secara terus menerus. Di dalam perjalannya terjadi banyak pro kontra dan perdebatan menarik. Kehadiran masyarakat akademik dan praktisi untuk bersedia berkolaborasi. Kesenjangan antara konsep dan implementasi sudah sepatutnya terjadi. Kesediaan untuk duduk bersama semua pihak, mendiskusikan persoalan yang muncul. Faktanya sampai dengan saat ini, di tengah riuh alam pikiran seluruh lapiran masyarakat tentang akuntansi sektor publik. Secara nyata diterapkan dan dibutuhkan bagi terkawalnya kinerja organisasi.

Daftar Pustaka

- Briando, B. (2021). Akuntansi Sektor Publik Dalam Potret Khazanah Budaya Melayu. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(2), 56–71. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.40>
- Elim, I., Wangkar, A., Wangkar, A., Runtu, T., Runtu, T., Latjandu, L. D., & Latjandu, L. D. (2022). Public Sector Accounting and Organizational Performance: Study in Indonesian Health Care Industry. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 5(3), 77. <https://doi.org/10.26487/hebr.v5i3.3410>
- Fahlevi, H., Irsyadillah, I., Arafat, I., & Adnan, M. I. (2022). The inefficacy of accrual accounting in public sector performance management: Evidence from an emerging market. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122162>
- Fandi Prasetya. (2023). The Journey of Indonesian Government Accounting. *Accounting and Management Journal*, 7(1), 84–94. <https://doi.org/10.33086/amj.v7i1.3954>
- Handayani, A., Maulana, J., Kemala, P., & Lubis, D. (2024). Studi Literatur : Implementasi Teori Akuntansi Pada Laporan Keuangan Sektor Publik. 2.
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Kahar, A., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2023). the Effect of Budget, Audit and Government Performance: Empirical Evidence From Indonesian Regional Governments. *Economy of Regions*, 19(1), 289–298. <https://doi.org/10.17059/EKON.REG.2023-1-22>
- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 300–306.

Khafifah, A., Haliah, H., Nirwana, N., & Oemar, M. A. F. I. (2020). Model Implementasi dan Problematika Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud Di Era Digital. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 252–262. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.385>

Kristiani, D., & Hamidah. (2022). MODEL PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNTUK MENCEGAH FRAUD PADA SEKTOR PUBLIK DI ERA DIGITAL. *Jurnal Sistem Komputer Triguna Dharma (JURSIK TGD)*, 1(3), 81–86. <https://doi.org/10.53513/jursik.v1i3.5278>

Maqdliyan, R. (2022). Determinan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Akuntabilitas Sektor Publik: Pendekatan Teori Institusional. *Jwm (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 10(3), 198–203. <https://doi.org/10.20527/jwm.v10i3.218>

Martadinata, S. (2023). Memahami Suasana Dilematis Antara Hutan Dan Uang Melalui Semiotika Akuntansi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 203–214. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1400>

Martadinata, S. (2024). Kajian Tentang Akuntansi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Studi Literature. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(4), 240–243. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i4.40>

Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 94–116.

Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik.

Yogi Pranata. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Implementasi Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473>